

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Afrizal, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amiruddin. & Asikin, H.Z. (2012). *Pengantar Metode Pelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin. & Asikin, H.Z. (2019). *Pengantar Metode Pelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo.
- Arba. (2017). *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmawidjaja, E.S., Zaldy, S., & Chusaini, H.A. (2015). *Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Kedungsepur*. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.
- Badan Pengkajian MPR RI. (2017). *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI & Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. (2022). *Kabupaten Batang dalam Angka 2022*. Batang: BPS Kabupaten Batang.
- Huda, N. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. & Nazriyah, R. (2019). *Teori & Peraturan Perundang-Undangan*. Kota tidak ditemukan: Penerbit tidak ditemukan.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, B.J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Koesnadi, H. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: University Press.

- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Subardjo. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: CV. MARKUMI.
- Sutaryono, Riyadi, R., & Widiyantoro, S. (2020). *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Wahid, A.M.Y. (2014). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.
- Widodo, H. & Perwitasari, D. (2020). *Hukum Tata Ruang*. Surabaya: Unesa University Press.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

B. Jurnal

- Alinda, S.N., Setiawan, A.Y., & Sudrajat, A. (2021). Alih Fungsi Lahan dari Sawah Menjadi Perumahan di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. *Jurnal Geografi Geoarea*, 04(02). doi: doi tidak ditemukan
- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Penataan Ruang terhadap Alih Fungsi Lahan dalam rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1). doi: doi tidak ditemukan
- Berry, M.F. (2018). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, 2(2). doi: <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law>.
- Dolly, F.I., Purnaweni, H., Kismartini, K., & Susanti AS, M. (2022). Peranan *Stakeholders* Di Kabupaten Bungo, Jambi dalam Pencegahan Praktek Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian: Tinjauan Dari Perspektif *Governance*. *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*, 8(1). doi: <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v8i1.301>

Imamulhadi. (2021). Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas dan Norma. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1). doi: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.146>

Permatasari, P. (2016). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang (Studi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang dikaitkan dengan Tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 10(2). doi: doi tidak ditemukan

Senjaya, I.W. (2017). Kebijakan Publik Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Batang: Analisis Teori David Easton. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4). doi: doi tidak ditemukan

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039

Peraturan Bupati Batang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Batang

D. Tesis dan Disertasi

Handari, A.W. (2012). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang*. (Tesis Magister, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia).

Meirina, L.V. (2017). *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkait Pembangunan Perumahan di Kabupaten Malang*. (Tesis Magister, Universitas tidak ditemukan, Malang, Indonesia).

E. Website

Rozali, R. (2013). Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan. Diakses pada 18 Juni 2022 dari <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

Kabupaten Batang Dalam Angka 2022. Diakses pada tanggal 21 November 2022 dari <https://batangkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/db9f3354c1328da4a782/kabupaten-batang-dalam-angka-2022.html>

Kecamatan Batang Dalam Angka 2022. Diakses pada tanggal 20 November 2022 dari <https://batangkab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Kecamatan+Batang+dalam+angka&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilan>